

## BAB IV

### PENGARUH STRUKTUR ANCAMAN TERHADAP VARIASI DOKTRIN PERTAHANAN INDONESIA

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan pertama, hubungan sipil-militer Indonesia pada dua periode yaitu periode Demokrasi Terpimpin dan periode Orde Baru. Kedua, bab ini juga bertujuan untuk menguji hipotesa berdasarkan pertanyaan penelitian. Analisa bab ini menggunakan pemikiran Michael C. Desch tentang struktur ancaman dan pengaruhnya terhadap hubungan sipil-militer. Desch juga menambahkan doktrin militer sebagai variabel domestik dengan aspek-aspek tertentu dari doktrin militer yang ikut menentukan kekuatan kontrol sipil atas militer. Untuk kasus Indonesia, intensitas ancaman dapat dilihat dari penggelaran operasi-operasi militer. Dari operasi-operasi militer yang digelar akan diidentifikasi apakah operasi militer itu bersifat internal atau eksternal, identifikasi ini bertujuan untuk menentukan kuadran yang akan menentukan sifat hubungan sipil militer dari masing-masing periode, serta pengaruhnya terhadap variasi doktrin pertahanan Indonesia.

#### 4.1. Periode Demokrasi Terpimpin

Instabilitas politik dan keamanan pada masa Demokrasi Liberal (1949-1959) merefleksikan kegagalan penerapan sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Pergantian kepala pemerintahan (perdana menteri) menjadi sesuatu yang lumrah akibat kuatnya tekanan dari partai-partai yang berkuasa, seperti Masyumi, PNI, PKI, NU, PSI dan Murba dimana hal ini menimbulkan instabilitas politik yang berkepanjangan. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno atas nama pemerintah dalam pidatonya di depan Konstituante pada tanggal 22 April 1959 menganjurkan agar Konstituante menetapkan kembali UUD 1945 sebagai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>64</sup> Konstituante merespon imbauan ini dengan mengadakan sidang untuk menerima atau menolak usulan pemerintah tersebut, namun karena tak kunjung mencapai kuorum 2/3 jumlah anggota sidang mengalami jalan buntu. Menyadari krisis yang semakin

---

<sup>64</sup> Nugroho Notosusanto (ed.), *Pejuang dan Prajurit : Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hal. 46.

memuncak, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno kemudian mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante, pembentukan MPRS serta berlakunya kembali UUD 1945, Dekrit tersebut menandai berakhirnya periode Demokrasi Liberal dan dimulainya periode Demokrasi Terpimpin.

#### **4.1.1. Struktur Ancaman dan Hubungan Sipil-Militer**

Pada periode Demokrasi Terpimpin, intensitas ancaman yang ditandai dengan penggelaran operasi-operasi militer intensitasnya tinggi baik ancaman eksternal maupun internal. Perebutan Irian Barat dari tangan Belanda dan neo-kolonialisme Inggris di Malaysia serta penumpasan pemberontakan-pemberontakan bersenjata menjadi titik fokus utama yang harus dihadapi Indonesia pada periode ini. Dengan struktur ancaman eksternal dan ancaman internal yang intensitasnya sama-sama tinggi menempatkan Indonesia pada kuadran Jalan Tengah (Q3). Mengikuti prediksi teori struktural Desch terdapat enam variabel yang mempengaruhi hubungan sipil-militer untuk struktur ancaman yang berbeda-beda. Untuk kasus Indonesia dalam periode Demokrasi Terpimpin, penulis membatasi untuk menganalisis variabel kepemimpinan.

Teori Struktural Desch memprediksikan ancaman eksternal maupun internal yang tinggi berpotensi memunculkan pemimpin yang tidak memahami masalah-masalah militer. Di sisi lain dengan ancaman internal yang juga tinggi, dorongan keterlibatan militer dalam politik menjadi lebih besar.<sup>65</sup> Karena politisi sipil seringkali terbagi menurut garis politik yang mereka anut, dengan adanya ancaman internal yang tinggi membuat mereka melibatkan kalangan militer dalam politik dimana hal ini berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan sipil itu sendiri karena masing-masing pihak mencari dukungan militer yang dianggap lebih kompeten dalam masalah-masalah teknis mereka untuk menghadapi ancaman internal.

Kekacauan yang ditimbulkan akibat instabilitas politik dan keamanan serta kekecewaan terhadap partai-partai politik yang terbukti hanya memperjuangkan kepentingan golongannya saja mendorong Presiden Soekarno

---

<sup>65</sup> Kusnanto Anggoro, "Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani dan Transisi Demokratik dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (ed), *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia : Perspektif Sipil dan Militer*, (Jakarta : CSIS, 1999), hal. 29.

untuk memberi akses kepada militer untuk duduk dalam politik. Dimulai dengan propaganda Presiden Soekarno untuk konsep golongan fungsional atau golongan karya sebagai salah satu perwakilan politik di samping partai-partai.

Selanjutnya melalui Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957 keterlibatan militer dalam politik semakin dimantapkan. Konsepsi Presiden pada intinya mengandung : pertama, himbuan Presiden untuk mengganti sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, Presiden mendesak pembentukan Kabinet Gotong Royong atau disebut juga ‘kabinet kaki empat’ yang terdiri atas empat partai besar pada masa itu yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Ketiga, pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsional dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Dewan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dilantik pada 12 Juli 1957 terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat, tokoh-tokoh daerah yang dianggap perlu, pejabat militer dan sipil serta menteri-menteri yang dianggap perlu. Selain itu terdapat anggota *ex-officio* yaitu KSAD Mayor Jenderal A.H. Nasution, KSAU Komodor Suryadi Suryadharma, KSAL Laksamana Madya R. Subijakto dan Kepala Kepolisian Negara R. Said Soekanto Tjokroatmodjo serta wakil Perdana Menteri dan Jaksa Agung.<sup>67</sup> Sementara dalam Kabinet Karya juga diberi tempat kepada kalangan militer untuk berpartisipasi diantaranya dengan didudukannya Kolonel Pelaut Mohamad Nazir sebagai Menteri Pelayaran, Kolonel Infantri dr. Azis Saleh sebagai Menteri Kesehatan dan Kolonel Infantri Suprayogi sebagai Menteri Urusan Distribusi.<sup>68</sup> Dengan masuknya para kepala staf angkatan dan kepolisian serta para perwira dalam Dewan Nasional dan Kabinet Karya maka TNI telah memperoleh legalitas dalam fungsi sosial politiknya bersama-sama dengan golongan fungsional lainnya.

Usaha-usaha untuk mendapatkan peran politik permanen bagi militer terlepas dari keadaan darurat perang yang sedang berlaku pada waktu itu semakin digalang oleh KSAD A.H Nasution. Kalangan militer yang merasa trauma dengan

<sup>66</sup> Nugroho Notosusanto (ed.), *Op. Cit.*, hal. 76.

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi : Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*, (Jakarta: Aksara Karunia, 2002), hal. 23.

intervensi parlemen dalam masalah-masalah internal TNI yang berujung pada Peristiwa 17 Oktober 1952 berusaha untuk semakin memantapkan posisi TNI dalam politik. Dalam pidatonya pada Akademi Militer Nasional Magelang pada 12 November 1958 mengemukakan konsep “Jalan Tengah” yang berbunyi :

“Kita tidak menginginkan dan kita tidak akan menjiplak situasi seperti yang terdapat di beberapa negara Amerika Latin, dimana tentara bertindak sebagai satu kekuatan politik yang langsung, demikian pula kita tidak akan meniru model Eropa Barat di mana tentara merupakan alat mati (dari pemerintah)...”<sup>69</sup>

Konsep jalan tengah pada intinya menegaskan bahwa TNI merupakan kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial. Sosial yang dimaksud adalah karya bakti (*civic mission*) dan terlibat di pemerintahan dengan turut menentukan kebijaksanaan negara pada tingkat yang tertinggi seperti masalah sosial-ekonomi bahu membahu dengan kekuatan-kekuatan lainnya. TNI juga menuntut hak perwakilan tetap pada lembaga eksekutif dan legislatif.

Dalam konteks Indonesia, prediksi Teori Struktural yang menyatakan bahwa ancaman eksternal dan internal yang intensitasnya tinggi dapat memunculkan pemimpin yang tidak berpengalaman dalam urusan-urusan militer dapat dilihat pada kepemimpinan Presiden Soekarno pada periode Demokrasi Terpimpin terutama dalam menyikapi pertikaian antara Indonesia dan Belanda mengenai status Irian Barat. Presiden Soekarno menyerukan agar perjuangan merebut Irian Barat tidak hanya melalui jalan diplomasi saja namun juga melalui penggelaran kekuatan militer untuk menekan Belanda dalam perundingan-perundingan. Sementara Nasution sebagai KSAD berpendapat agar Indonesia tidak tergesa-gesa memasuki konfrontasi militer melainkan memandang situasinya secara realistis.<sup>70</sup> Nasution merujuk pada besarnya alokasi anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah apabila memilih opsi militer, sementara di sisi lain Belanda memiliki angkatan laut dan udara yang sangat kuat serta memiliki aliansi dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sehingga melakukan serangan militer terhadap Belanda di Irian Barat artinya sama saja dengan

<sup>69</sup> Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwi Fungsi ABRI*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 219.

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 275.

memancing aliansinya untuk menyerang Indonesia. Namun Presiden Soekarno tidak mengindahkan saran Nasution tersebut dan tetap mengumandangkan Trikora yang kemudian diikuti dengan pembentukan Komando Mandala yang merupakan operasi militer gabungan untuk merebut Irian Barat. Pertentangan antara Soekarno dan Nasution yang merepresentasikan elit sipil dan militer menunjukkan di masa dimana ancaman baik internal dan eksternal intensitasnya tinggi dapat memunculkan ketidaksesuaian gagasan antara sipil dan militer mengenai kebijakan-kebijakan yang menyangkut pertahanan negara yang diakibatkan oleh kehadiran pemimpin sipil yang tidak menguasai masalah-masalah militer sepenuhnya.

Sengketa Irian Barat dipicu oleh keengganan Belanda untuk meninggalkan Irian Barat sementara menurut Konfrensi Meja Bundar yang disepakati kedua negara pada tanggal 23 Agustus 1949, Belanda harus menyerahkan dan mengakui kedaulatan atas seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) termasuk Irian Barat sebagai bagian dari RIS. Masalah ini diperkeruh dengan tindakan unilateral Belanda, atas persetujuan parlemennya memasukkan Irian Barat ke dalam pembentukan *South Pasific Comission* yaitu suatu organisasi yang anggotanya terdiri dari negara-negara Pasifik Selatan yang belum memiliki pemerintahan sendiri (*non-selfgoverning territories*).<sup>71</sup>

Berbagai upaya diplomasi melalui forum PBB dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan Irian Barat namun selalu mengalami jalan buntu karena Belanda tetap menolak untuk meninggalkan Irian Barat bahkan memperkuat pasukan dan angkatan perangnya disana. Pemerintah Indonesia menjawab tantangan ini dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih konkrit menyangkut status Irian Barat, diantaranya dengan pembentukan propinsi Irian Barat dengan ibukota Soasiu di Tidore serta pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang meliputi seluruh unsur organisasi buruh, tani dan militer. Di sisi lain rapat-rapat akbar untuk mengecam tindakan Belanda semakin sering digelar, bahkan dalam rapat akbar Kongres Rakyat Seluruh Indonesia (KRSI) mengeluarkan resolusi yang menyatakan Belanda sebagai negara agressor dan mendesak agar Pemerintah membekukan dan menyita seluruh

---

<sup>71</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sedjarah ABRI-Perjuangan Irian, *Op.Cit.*, hal. 2.

modal perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.<sup>72</sup> Pada perkembangannya Pemerintah Indonesia menyadari bahwa perjuangan merebut Irian Barat tidak cukup melalui jalur diplomasi saja, namun harus didukung kekuatan militer sehingga sinergi antara keduanya ditingkatkan dengan intensif.

Ancaman eksternal lainnya yang dihadapi Indonesia adalah neo-kolonialisme Inggris di Malaysia melalui pembentukan negara Federasi Malaysia. Gagasan ini dicetuskan oleh Tengku Abdul Rachman pada tanggal 27 Mei 1961 di depan *The Foreign Correspondents Association of South East Asia*.<sup>73</sup> Penggabungan negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei ini dengan segera mendapat dukungan dari Inggris yang didasari oleh latar belakang ekonomi dan strategi.

Filipina dan Indonesia merupakan negara yang menentang pembentukan Federasi Malaysia, Filipina dilatarbelakangi oleh alasan historis dan yuridis mengklaim wilayah Sabah sebagai milik Sultan Sulu yang disewakan kepada Inggris, Sedangkan Indonesia berdasarkan pertimbangan strategis dan karakter Presiden Soekarno yang anti kolonialis, menganggap Federasi Malaysia adalah kolonialisme gaya baru yang dipraktikkan Inggris dan hal ini dapat membahayakan Revolusi Indonesia serta tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan PBB. Kekhawatiran akan pembentukan Federasi Malaysia juga timbul dari kalangan militer Indonesia, termasuk Jenderal Nasution. Hal ini didasari oleh fakta bahwa Malaysia merupakan negara yang heterogen dengan didominasi oleh etnis Melayu, China, dan India yang tersebar di beberapa negara bagian. Jika dibentuk suatu federasi dan Malaysia kesulitan untuk mengontrol etnis China maka dikhawatirkan Partai Komunis China akan dengan leluasa untuk meluaskan pengaruhnya di Malaysia dimana hal ini dapat memperkuat pengaruh Partai Komunis Indonesia yang memang merupakan lawan politik TNI khususnya Angkatan Darat.<sup>74</sup> Karena sebagaimana telah diketahui, pemerintahan Soekarno pasca-perebutan Irian Barat lebih condong ke Uni Sovyet dan China yang

---

<sup>72</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI Jilid IV, *Op.Cit*, hal. 111.

<sup>73</sup> Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sedjarah ABRI, *Op. Cit.*, hal. 122.

<sup>74</sup> Donald Hindley, Indonesia's Confrontation with Malaysia: A Search for Motives, *Asian Survey*, Vol. 4, No. 6, (June : 1964), hal. 5.

beraliran komunis. Di sisi lain, terdapat perbedaan pendapat masyarakat di negara-negara bekas jajahan Inggris tersebut, khususnya Sabah dan Serawak antara setuju atau menolak pembentukan Federasi Malaysia, sehingga Presiden Soekarno merasa perlu untuk membantu menyuarkan aspirasi masyarakat yang masih serumpun dengan Indonesia tersebut.

Ketegangan ini mencoba dijematani dengan pertemuan antara ketiga negara yaitu Indonesia, Filipina dan persekutuan Tanah Melayu di Tokyo pada bulan Mei 1963. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan ketiga negara untuk meredakan ketegangan dengan cara-cara damai. Selanjutnya diadakan perundingan kembali antara ketiga negara di Filipina pada bulan Agustus 1963 yang kemudian menghasilkan *Manila Accord*, *Manila Declaration* dan *Joint Statement* yang merekomendasikan Misi Malaysia kepada Sekretaris Jenderal PBB yang bertugas mengadakan penyelidikan di Sabah dan Serawak untuk memastikan sikap masyarakat di kedua negara tersebut mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Hasil penyelidikan tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar rakyat Sabah dan Serawak menyetujui rencana pembentukan Federasi Malaysia, dan hal ini segera disusul dengan proklamasi Federasi Malaysia di Kuala Lumpur pada 16 September 1963. Pemerintah Indonesia menyampaikan protes terhadap hasil penyelidikan tersebut sekaligus terhadap proklamasi Federasi Malaysia dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Penolakan Indonesia dengan segera berubah menjadi politik konfrontasi total melalui pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia, pemutusan lalu lintas perekonomian dengan Malaya dan Singapura serta pernyataan Dwi Komando Rakyat oleh Presiden Soekarno yang diikuti oleh pembentukan Komando Siaga untuk membantu perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah dan Brunei yang menolak pembentukan Federasi Malaysia.

Sementara tingginya pemberontakan-pemberontakan bersenjata di berbagai daerah yang menuntut pemisahan wilayah merupakan ancaman internal yang dihadapi Pemerintah Indonesia pada periode Demokrasi Terpimpin. Diantaranya adalah DI/TII di Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, Republik Maluku Selatan, dan pemberontakan PRRI/Permesta. Selain mengancam integrasi NKRI, gerombolan-gerombolan ini juga meresahkan

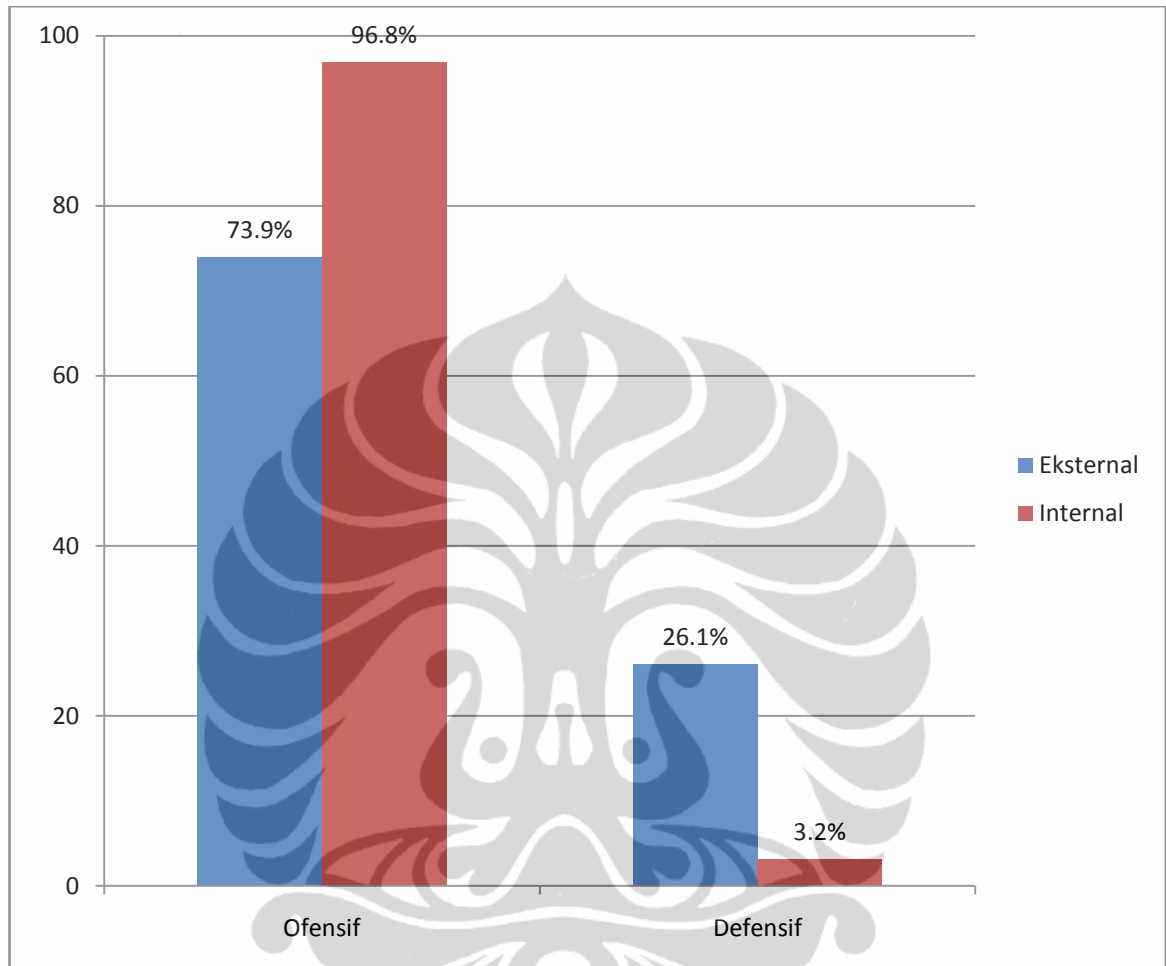
masyarakat yang menjadi basis mereka sehingga TNI menggelar operasi-operasi Kamdagri untuk menumpasnya.

#### **4.1.2. Operasi Militer Ofensif**

Instabilitas keamanan yang ditimbulkan oleh tingginya ancaman baik ancaman eksternal maupun internal memaksa Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas. Diantaranya adalah dengan penggelaran operasi-operasi militer baik yang sifatnya ofensif maupun defensif untuk mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut. Dalam Komando Mandala yaitu operasi militer perebutan Irian Barat, digelar operasi militer gabungan yang melibatkan tiga matra yaitu matra darat, laut dan udara melalui fase infiltrasi yang dirancang untuk pendudukan di wilayah-wilayah musuh serta persiapan untuk fase berikutnya yaitu fase eksploitasi. Sementara dalam konfrontasi Malaysia dimana konsep operasinya dirancang dalam Komando Siaga, operasi-operasi militer lebih banyak ditujukan untuk penyusupan dan sabotase di daerah lawan serta penjagaan daerah perbatasan dari pelanggaran-pelanggaran dengan mengandalkan pasukan KKO AL. Sedangkan untuk mengantisipasi ancaman internal, yaitu berupa pemberontakan-pemberontakan bersenjata DI/TII dan RMS digelar operasi-operasi kamdagri yang bertujuan untuk menghancurkan basis pemberontak, melalui strategi isolasi total yang dilaksanakan dengan bantuan masyarakat di sekitarnya. Berikut adalah grafik mengenai prosentase respon dan karakter operasi militer periode Demokrasi Terpimpin :



**Grafik 4.1.**  
**Prosentase Respon dan Karakter Operasi Militer terhadap Jenis Ancaman**  
**periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)<sup>75</sup>**



*Sumber* : diolah dari operasi- operasi militer yang bersumber dari Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid II, 1950-1959* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000); Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid III, 1960-1965* (Jakarta: Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000).

Grafik 4.1. menunjukkan operasi-operasi militer yang digelar pada periode Demokrasi Terpimpin intensitasnya sama-sama tinggi baik untuk menghadapi ancaman eksternal maupun internal yaitu sebesar 73,9% untuk mengatasi ancaman eksternal dan 96,8% untuk mengatasi ancaman internal dimana kedua jenis operasi tersebut didominasi oleh karakteristik ofensif. Sedangkan operasi

<sup>75</sup> *Sumber* : diolah dari operasi- operasi militer yang bersumber dari Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid II, 1950-1959* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000); Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid III, 1960-1965* (Jakarta: Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000).

militer yang berkarakteristik defensif berjumlah 26,1% untuk mengatasi ancaman eksternal dan hanya 3,2% untuk mengatasi ancaman internal. Grafik ini menunjukkan pada periode Demokrasi Terpimpin intensitas ancaman baik eksternal maupun internal sama-sama tinggi dengan menekankan pada unsur-unsur ofensif. Struktur ancaman yang tinggi baik dari luar maupun dari dalam memaksa dilakukannya operasi-operasi militer yang sifatnya agresif dan ke luar batas nasional untuk menghadapi ancaman tersebut. Karena operasi militer merupakan pengimplementasian strategi militer yang dirumuskan dalam doktrin pertahanan maka hal ini menunjukkan karakter doktrin pertahanan Indonesia yang ofensif pada periode Demokrasi Terpimpin.

#### **4.2. Periode Orde Baru**

Gejolak politik yang terjadi pada periode Demokrasi Terpimpin mencapai titik kulminasi melalui pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965 yang menewaskan petinggi TNI AD. Gelombang kemarahan rakyat atas pengkhianatan PKI serta sikap Presiden Soekarno yang cenderung lamban dalam menuntut pertanggungjawaban PKI memicu serangkaian aksi demonstrasi oleh berbagai kesatuan mahasiswa. Melalui Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) mereka menuntut : pembubaran PKI, pergantian Kabinet serta penurunan harga/perbaikan ekonomi. Menanggapi tuntutan tersebut, Presiden melakukan *reshuffle* kabinet yang diberi nama Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan terdiri atas 102 orang menteri namun diantaranya terdapat orang-orang yang dicurigai terlibat dalam G 30 S/PKI, hal ini menimbulkan aksi-aksi mahasiswa yang lebih keras dan militan. Situasi yang semakin memanas membuat Presiden Soekarno dievakuasi ke Istana Bogor dan menandatangani surat pemberian wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Langkah pertama yang diambil Jenderal Soeharto adalah membubarkan PKI dan membersihkan kabinet dari orang-orang yang diduga berkaitan dengan PKI.

Selanjutnya MPRS mengadakan sidang untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas krisis nasional yang meliputi instabilitas keamanan, pemberontakan PKI serta tingkat inflasi yang tinggi.

Pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak oleh MPRS, Sidang juga menetapkan pemberhentian Presiden Soekarno sebagai Presiden dan mandataris MPRS. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 1967 presiden Soekarno menandatangani surat penyerahan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto dan melalui Tap. No.IX MPRS, Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai Presiden RI, dengan itu menandai berakhirnya periode Demokrasi Terpimpin dan dimulainya periode Orde Baru.

#### **4.2.1. Struktur Ancaman dan Hubungan Sipil-Militer**

Pada periode ini, terjadi perubahan orientasi politik dan pertahanan Indonesia dalam menyikapi struktur interaksi antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Periode sebelumnya yang kental dengan nuansa-nuansa konfrontasi mulai bergeser ke arah yang lebih lunak, yaitu diplomasi dengan menekankan pada pembangunan ekonomi Indonesia melalui prinsip ‘bertetangga baik’ sehingga Indonesia cenderung untuk melihat negara-negara di kawasan regionalnya sebagai mitra. Hal ini dapat dilihat dalam usaha-usaha penyelesaian konfrontasi Malaysia yang diarahkan ke meja perundingan sehingga menghasilkan *Jakarta Accord* yang dengan begitu mengakhiri pertikaian antara Indonesia dan Malaysia.

Perubahan orientasi politik dan pertahanan serta lingkungan keamanan regional yang relatif stabil membuat Pemerintah Indonesia berkonsentrasi sepenuhnya untuk fokus pada ancaman-ancaman yang sifatnya internal yaitu ancaman gerakan-gerakan separatis bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Irian Jaya, penumpasan PKI, penumpasan pemberontakan PGRS/Paraku, serta ancaman terorisme Imron dan Warman. Di sisi lain, pada periode ini pemerintah juga menghadapi ancaman eksternal yaitu aneksasi Timor Timur.

Hubungan sipil militer pada kuadran ini ditandai dengan kondisi dimana ancaman eksternal rendah dan ancaman internal tinggi menempatkan periode Orde Baru pada kuadran Dwifungsi (Q4). Untuk kasus Indonesia dalam periode Orde Baru, penulis membatasi untuk menganalisis variabel orientasi doktrinnya dimana tingginya ancaman internal sangat berpengaruh pada orientasi doktrinnya.

Doktrin yang akan dianalisis pada periode Orde Baru adalah Doktrin Tri Ubaya Çakti 1966, Doktrin Catur Darma Eka Karma/CADEK 1967, Doktrin CADEK 1988, Doktrin Pertahanan Keamanan Negara 1991 serta Doktrin Sad Daya Dwi Bakti 1994. Analisa mengenai cara pandang doktrin-doktrin diatas dibatasi pada bagaimana persepsi doktrin-doktrin tersebut terhadap hakekat ancaman serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Telaah mengenai cara pandang doktrin akan menjadi *intervening variable* yang akan menunjukkan sifat hubungan sipil- militer Indonesia pada periode Orde Baru.

Doktrin Tri Ubaya Çakti 1966 dan Doktrin Cadek 1967 masing-masing mengidentifikasi ancaman ke dalam dua jenis yaitu : ancaman yang datangnya dari dalam yang berupa infiltrasi, subversi dan pemberontakan baik mental maupun fisik dari kekuatan-kekuatan dalam tubuh masyarakat sendiri. Sedangkan ancaman dari luar diidentifikasi berupa pertama, infiltrasi dan subversi baik mental maupun fisik serta intervensi dari kekuatan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk. Kedua, invasi oleh kekuatan-kekuatan musuh melalui darat, laut dan udara.<sup>76</sup> Doktrin Cadek 1988 menyebutkan hakikat ancaman adalah “setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan secara konsepsional dan bertujuan untuk merombak atau mengubah tataan keberadaan bangsa dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 baik yang datangnya dari luar negeri maupun dalam negeri.”<sup>77</sup> Doktrin Hankam 1991 menjelaskan hakikat ancaman sebagai “ segala sesuatu yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara secara negatif yang mencakup spektrum yang lebar dari yang berintensitas rendah dalam bentuk kejahatan kriminal, sabotase, teror dan subversi sampai yang berintensitas tinggi seperti pemberontakan bersenjata, perang terbatas dan perang terbuka baik dengan senjata konvensional maupun penghancuran massal.”<sup>78</sup> Sementara Doktrin Sad Daya Dwi Bakti 1994 menjelaskan ancaman dari luar negeri dapat berbentuk perang umum, perang terbatas, perang revolusioner, subversi dan teror

<sup>76</sup> Doktrin Hankamnas dan Doktrin Perjuangan ABRI “Catur Darma Eka Karma”, *Op. Cit*, hal. 44.

<sup>77</sup> Doktrin Perjuangan TNI-ABRI, Cadek, *Op. Cit*, hal. 27.

<sup>78</sup> Doktrin Pertahanan dan Keamanan Negara, *Op. Cit*, hal. 22.

internasional, dan ancaman dari dalam negeri berbentuk subversi, kriminalitas, kerusuhan masa dan pemberontakan.<sup>79</sup>

Dari telaah kelima doktrin diatas, kelimanya mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman dengan menggelar dua macam pola operasi militer yaitu : pola-pola operasi pertahanan yang digelar untuk menghadapi ancaman dari luar dan pola-pola operasi kamdagri yang meliputi operasi intelejen, operasi tempur dan operasi teritorial untuk menghadapi ancaman dari dalam. Selanjutnya pada periode Orde Baru karena intensitas ancaman yang terus-menerus datang dari dalam maka operasi-operasi militer yang digelar lebih ditujukan untuk menghadapi ancaman internal atau ke dalam wilayah nasional. Selain itu, tidak adanya hasrat untuk perluasan teritorial melalui penggelaran operasi-operasi militer yang bersifat ekspansionis ke luar batas nasional dan pelaksanaan operasi-operasi Kamla yang hanya ditujukan untuk patroli dan perlindungan terhadap perairan teritorial semakin menegaskan cara pandang doktrin pertahanan yang lebih ke berorientasi ke dalam wilayah nasional semata.

Doktrin yang berorientasi ke dalam secara otomatis akan membuat orientasi militer sepenuhnya ke dalam (*inward*) sehingga sangat rentan menimbulkan intervensi langsung militer ke dalam masalah-masalah politik, terutama yang berkaitan langsung dengan ranah profesionalnya yaitu kebijakan-kebijakan yang menyangkut pertahanan negara. Kondisi ini membuat keterlibatan militer dalam politik menjadi tidak bisa terelakkan. Kusnanto Anggoro menyebutkan persistensi ancaman internal yang mendominasi periode Orde Baru dengan sendirinya memaksa militer untuk lebih berorientasi ke dalam. Bersama dengan obsesi mereka untuk memelihara keamanan dan mempertahankan integritas nasional, ancaman disintegrasi bukan hanya akan mengukuhkan peran politik militer tetapi juga identifikasi mereka pada pemerintah.<sup>80</sup>

Keterlibatan militer ke dalam politik akibat ancaman internal yang tinggi dapat dilihat pada periode Orde Baru. Pada periode ini, konsepsi Jalan Tengah yang mengandung esensi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan sosial dikembangkan sehingga fungsinya tidak lagi terbatas pada kekuatan sosial saja

<sup>79</sup> Doktrin Sad Daya Dwi Bakti, *Op. Cit*, hal. 10.

<sup>80</sup> Kusnanto Anggoro, "Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani dan Transisi Demokratik dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (ed), *Op. Cit*, hal. 29.

namun sebagai kekuatan sosial-politik yang menonjolkan identitas sosial politiknya melalui program-program kekarayaan.

Pada periode Orde Baru peran TNI tidak lagi hanya sebatas intervensi namun menguasai dengan cara menduduki dengan peran untuk mengontrol kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Hal ini dilegalkan melalui Seminar Seskoad pada tahun 1966 yang merumuskan Doktrin Catur Darma Eka Karma dimana di dalam doktrin tersebut peran TNI sebagai Dwifungsi yaitu fungsi pertahanan dan fungsi sosial politik mendapat legalitas. Dengan legalitas ini TNI semakin mendapat keleluasaannya untuk melakukan fungsi sosial politiknya dengan ikut duduk dalam pemerintahan dan parlemen. Pada tahun 1977 kurang lebih 53,5% posisi di pemerintahan sudah diduduki oleh militer. Kemudian pada tahun 1981, kurang lebih terdapat 8025 jumlah anggota TNI yang dikaryakan di posisi-posisi strategis.<sup>81</sup> Dalam perkembangannya TNI menjadi alat kekuasaan yang berfungsi untuk mengontrol sipil melalui keterlibatannya di DPR/MPR (legislatif), partai politik (Golkar), menjabat sebagai menteri maupun kepala daerah (eksekutif) dan menjalankan aturan hukum (yudikatif).<sup>82</sup>

Di sisi lain, pengadopsian doktrin Dwifungsi dan doktrin Sishankamrata serta perubahan tipologi ancaman dengan menambahkan dimensi non-fisik seperti subversi dan penetrasi ideologi sebagai hakekat ancaman semakin mengukuhkan keterlibatan TNI ke dalam bidang-bidang non-militer melalui peranan Komando Teritorial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menempatkan TNI khususnya Angkatan Darat, sebagai instrumen inti yang mengharuskannya pertama, memiliki struktur permanen dan ruang gerak yang luas, kedua, menempatkan struktur tersebut paralel dengan struktur pemerintahan sipil melalui Kodam sampai ke tingkat Babinsa, ketiga, internalisasi ancaman membuat operasi militer lebih ditujukan untuk operasi kamdagri dengan menekankan pada operasi intelejen dan teritorial.<sup>83</sup>

Pada periode Orde Baru hubungan sipil militer yang berada pada kuadran Dwifungsi merupakan hubungan sipil militer “paling buruk”. Militer telah

<sup>81</sup> Salim Said, *Op. Cit*, hal. 94.

<sup>82</sup> M. Riefqi Muna, “ Persepsi Militer dan Sipil Tentang Dwifungsi : Mengukur Dua Kategori Ganda” dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (ed), *Op. Cit*, hal. 47.

<sup>83</sup> Propatria Institute, *Loc. Cit*, hal. 3.

sepenuhnya terlibat ke dalam politik yang sebenarnya bukan merupakan ranah profesionalismenya. Struktur ancaman pada periode ini dimana ancaman internal tinggi sementara ancaman eksternal rendah turut mempengaruhi keterlibatan militer ke dalam politik.

Intensitas ancaman internal yang tinggi pada periode Orde Baru didominasi oleh gerakan-gerakan separatis bersenjata di berbagai daerah dan konsekuensi dari PKI yang sudah ditetapkan sebagai organisasi yang terlarang, maka segala hal yang berkaitan dengan PKI terutama yang berkaitan dengan pemberontakan G 30 S/PKI ikut ditumpas pada awal-awal Orde Baru. Sebagai negara yang baru 20 tahun mengecap kemerdekaan dan baru saja mengalami pergantian rezim, gerakan-gerakan separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut kemerdekaan Aceh, Organisasi Papua Merdeka yang menuntut kemerdekaan Irian Barat, serta PGRS/Paraku yang sebelumnya merupakan pasukan sukarelawan yang dilatih dan dipersenjatai untuk konfrontasi Malaysia namun pada perkembangannya mereka berafiliasi dengan PKI, hal ini tidak saja mengancam disintegrasi bangsa namun keberadaan mereka meresahkan penduduk di daerah-daerah yang menjadi basisnya sehingga apabila tidak segera diambil tindakan tegas, hal ini bisa merembet ke daerah-daerah lain untuk menuntut hal yang sama.

Sementara ancaman eksternal yaitu aneksasi Timor Timur dipicu oleh kebijakan rezim baru di Portugal pasca Revolusi Mawar Merah, yang memberi kesempatan kepada rakyat di Timor Portugis untuk mendirikan partai-partai politik demi tersalurnya aspirasi rakyat. Maka bermunculan parpol-parpol baru dengan berbagai pandangan dan cita-cita mengenai masa depan Timor Portugis. Partai *Uniao Democratica Timorese* (UDT) menginginkan Timor Portugis tetap sebagai negara bagian Portugal, Partai *Frente Revolucionarie de Timor Leste Independente* (Fretilin) memperjuangkan kemerdekaan penuh, sementara Partai *Asociacao Populer Democratica de Timor* (Apodeti) menginginkan integrasi dengan Indonesia dengan latar belakang rakyat kedua wilayah memiliki persamaan dan hubungan erat baik secara historis, etnis maupun geografis.

Akibat dari perbedaan pandangan ketiga partai ini, Pemerintah Portugal merencanakan referendum pada bulan Maret 1978 untuk menentukan nasib Timor

Portugis, kebijakan ini diikuti dengan semakin giatnya ketiga partai melakukan konsolidasi demi tercapainya tujuan mereka. Demikian pula dengan Ketua Umum Apodeti Arnaldo dos Reis Araujo yang menyatakan bahwa partainya menghendaki Timor Portugis bergabung dengan Republik Indonesia dengan menjadi propinsi ke-27. Pernyataan ini disambut Pemerintah Indonesia dengan menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki ambisi teritorial namun menyambut baik tuntutan rakyat Timor Portugis untuk menjadi bagian integral RI. Maka diadakan berbagai perundingan untuk menjajaki integrasi Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia.

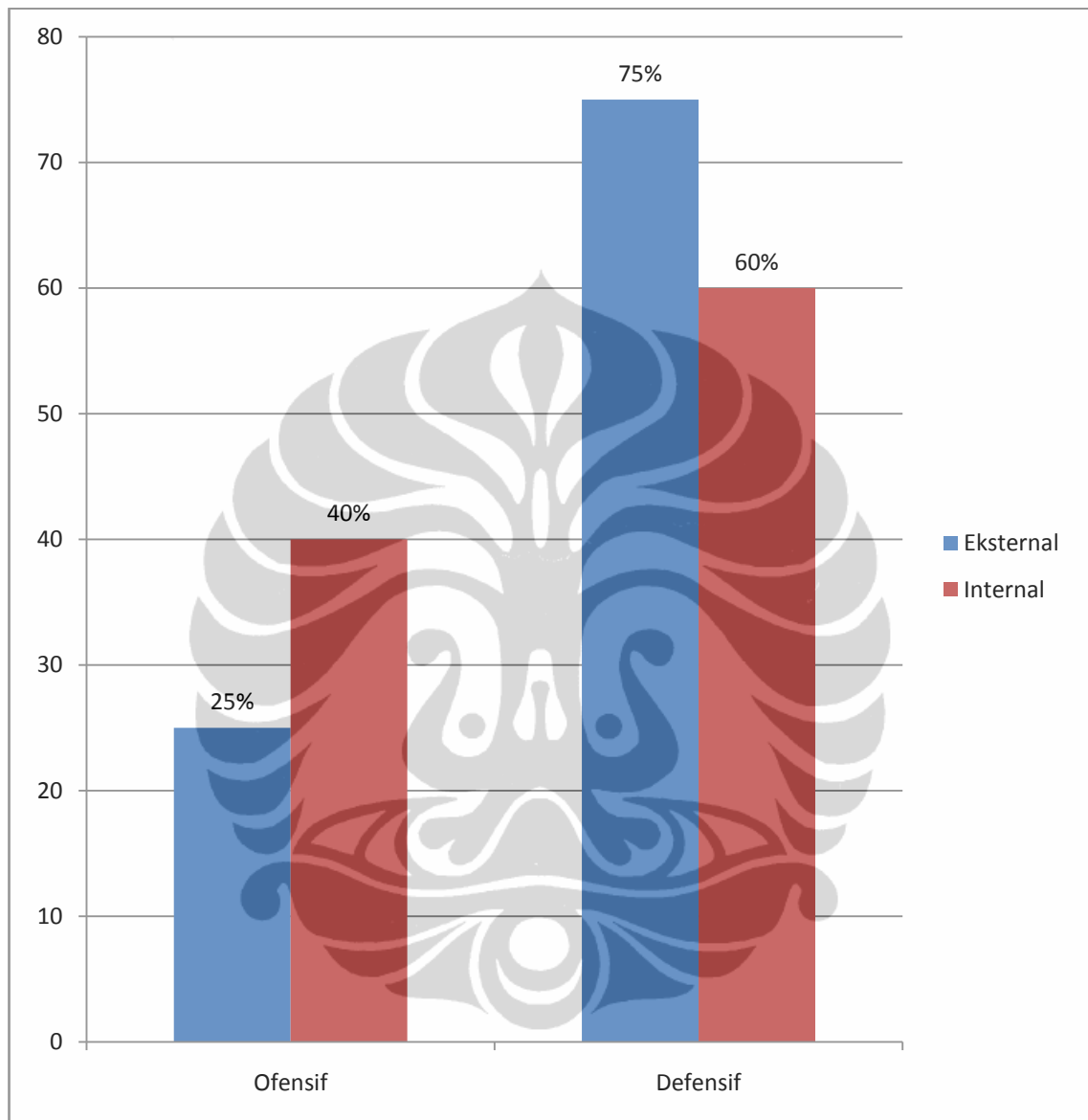
Pada 29 November 1975 ditandatangani pernyataan bersama antara Apodeti, UDT, Kota dan Trabalhista yang dikenal dengan Proklamasi Balibo mengenai integrasi Timor Portugis ke dalam NKRI. Namun Fretilin menolak dengan keras gagasan tersebut dan mengabaikan himbauan Portugal agar referendum berjalan dengan cara-cara damai dengan melancarkan teror dan melakukan penyitaan bahan makanan untuk kepentingan tentara kolonial Portugis baik di wilayah Timor Portugis maupun hingga melewati perbatasan Timor Portugis-Indonesia. Di sisi lain Portugal sudah tidak mampu lagi mengatasi instabilitas politik dan keamanan di Timor Portugis sehingga membawa masalah ini ke forum PBB yang kemudian menunjuk Indonesia dan Australia untuk mengatasi kekacauan di Timor Portugis. Berbagai peristiwa yang terjadi menimbulkan keresahan penduduk di daerah perbatasan sehingga Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas.

#### **4.2.2. Operasi Militer Defensif**

Tingginya intensitas ancaman internal membuat operasi-operasi militer selama periode Orde Baru didominasi oleh operasi kamdagri. Operasi militer yang digelar pada periode ini lebih banyak ditujukan untuk menumpas gerakan-gerakan separatis serta operasi-operasi untuk menjaga perbatasan kedaulatan NKRI baik di darat maupun di laut. Berikut adalah grafik mengenai prosentase respon dan karakter operasi militer periode Orde Baru.



**Grafik 4.2.**  
**Prosentase Respon dan Karakter Operasi Militer terhadap Jenis Ancaman**  
**periode Orde Baru (1966-1998)<sup>84</sup>**



*Sumber* : diolah dari tabulasi operasi militer yang bersumber dari Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid IV, 1966-1983* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000); Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid V, 1984-2000* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000).

<sup>84</sup> *Sumber* : diolah dari tabulasi operasi militer yang bersumber dari Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid IV, 1966-1983* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000); Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid V, 1984-2000* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000).

Grafik 4.2. menunjukkan operasi-operasi militer yang digelar pada periode Orde Baru yang didominasi oleh operasi militer yang berkarakteristik defensif untuk menghadapi ancaman eksternal sebesar 75% dan ancaman internal sebesar 60%. Sementara operasi militer yang berkarakter ofensif yang digelar untuk menghadapi ancaman eksternal sebesar 25% dan ancaman internal 40%. Grafik ini menunjukkan pada periode Orde Baru intensitas ancaman internal tinggi dan eksternal rendah menempatkan orientasi doktrin sepenuhnya ke dalam. Cara pandang doktrin yang sepenuhnya ke dalam wilayah nasionalnya saja merefleksikan karakter doktrin pertahanan yang tidak memandang ke luar batas nasionalnya, penggelaran kekuatan militer sepenuhnya hanya diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam serta menjaga teritorial dan kedaulatan NKRI. Doktrin yang cara pandangnya ke dalam secara tidak langsung akan mengadopsi karakter defensif karena doktrin tersebut tidak memiliki unsur-unsur ekspansionis yang keluar batas wilayah negaranya.

#### **4.3. Hasi Pengujian *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* untuk Mencari Korelasi Antara Struktur Ancaman dengan Karakter Operasi Militer**

Pengujian spss ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara struktur ancaman dengan karakteristik operasi militer. Data yang akan diuji melalui spss ini, merupakan data nominal. Data nominal merupakan data kategori dimana tidak ada tingkatan atau levelnya. Contoh : pria-wanita yang direpresentasikan dengan 1-2 dimana 1 tidak lebih tinggi nilainya dibandingkan 2.

Dalam kasus ini, struktur ancaman dikategorikan atas dua jenis yaitu : eksternal dan internal dalam pengolahan datanya “eksternal” direpresentasikan dengan angka 1 dan “internal” dengan angka 2. Sementara karakteristik operasi militer dikategorikan atas dua jenis yaitu : ofensif dan defensif, dimana “ofensif” direpresentasikan dengan angka 1 dan “defensif” dengan angka 2.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

$H_0$  : tidak ada hubungan antara baris dengan kolom atau, struktur ancaman dengan karakter operasi militer.

$H_1$  : ada hubungan antara baris dengan kolom atau, struktur ancaman dengan karakter operasi militer.

**Signifikansi** : tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) : 5% menentukan tingkat kepercayaan terhadap data sebesar 95% atau disebut juga *confidence interval* semakin kecil nilai *assymptom sigma* maka semakin kuat signifikansi atau korelasi antar dua variabel yang diuji.

#### 4.3.1. Hasil analisis SPSS terhadap korelasi antara struktur ancaman dengan karakter operasi militer pada periode Demokrasi Terpimpin.

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Ancaman * Karakter	55	100,0%	0	,0%	55	100,0%

Tabel ini menggambarkan informasi mengenai data yang telah di input ke dalam SPSS. Terdapat tiga kolom yaitu : *valid* menunjukkan data yang telah divalidasi oleh SPSS, *missing* menunjukkan data-data yang ‘hilang’ ata tidak bisa dibaca oleh SPSS, *total* menunjukkan jumlah keseluruhan data yang akan diuji.

Tabel ini menunjukkan bahwa data yang diinput berjumlah 55 data dan statusnya 100% valid.

#### Ancaman \* Karakter Crosstabulation

		Karakter		Total
		"Ofensif"	"Defensif"	
Ancaman	"Eksternal"	17	6	23
	"Internal"	31	1	32
Total		48	7	55

Tabel ini berfungsi untuk mengklasifikasikan data-data sesuai variabel yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti. Dari 55 kali operasi militer telah diidentifikasi :

- Operasi militer yang digelar untuk menghadapi ancaman eksternal yang berkarakteristik ofensif : berjumlah 17
- Operasi militer yang digelar untuk menghadapi ancaman eksternal yang berkarakteristik defensif : berjumlah 6

- Operasi militer yang digelar untuk menghadapi ancaman internal yang berkarakteristik ofensif : berjumlah 31
- Operasi militer yang digelar untuk menghadapi ancaman internal yang berkarakteristik defensif : berjumlah 1
- Jumlah operasi militer eksternal secara keseluruhan : 23
- Jumlah operasi militer internal secara keseluruhan : 32
- Jumlah operasi militer yang berkarakteristik ofensif : 48
- Jumlah operasi militer yang berkarakteristik defensif : 7

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,352 <sup>a</sup>	1	,012	,017	,017
Continuity Correction <sup>b</sup>	4,453	1	,035		
Likelihood Ratio	6,626	1	,010		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6,237	1	,013		
N of Valid Cases	55				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,93.

b. Computed only for a 2x2 table

- Tabel ini adalah hasil penghitungan *chi-square*, di sini dapat dilihat bahwa *value* dari *pearson chi-square* adalah 6,352. Karena *Chi-square* hitung  $6,352 > Chi-square$  tabel 5,9915 maka  $H_0$  ditolak.
- *Asymp. Sigma* memiliki nilai 0,012 karena nilainya  $<$  daripada alfa 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan secara otomatis  $H_1$  diterima.
- Kesimpulan : ada hubungan yang signifikan antara struktur ancaman dengan karakter operasi militer

#### 4.3.2. Hasil analisis SPSS terhadap korelasi antara struktur ancaman dengan karakter operasi militer pada periode Orde Baru.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Ancaman * Karakter	39	100,0%	0	,0%	39	100,0%

Tabel ini menunjukkan bahwa data yang diinput berjumlah 39 data dan statusnya 100% valid.

Ancaman \* Karakter Crosstabulation

Count		Karakter		Total
		"Ofensif"	"Defensif"	
Ancaman	"Eksternal"	1	3	4
	"Internal"	14	21	35
Total		15	24	39

Tabel ini berfungsi untuk mengklasifikasikan data-data sesuai variabel yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti. Dari 39 kali operasi militer telah diidentifikasi :

- Operasi militer yang digelar untuk menghadapi ancaman eksternal yang berkarakteristik ofensif : berjumlah 1
- Operasi militer yang digelar untuk menghadapi ancaman eksternal yang berkarakteristik defensif : berjumlah 3
- Operasi militer yang digelar untuk menghadapi ancaman internal yang berkarakteristik ofensif : berjumlah 14
- Operasi militer yang digelar untuk menghadapi ancaman internal yang berkarakteristik defensif : berjumlah 21
- Jumlah operasi militer eksternal secara keseluruhan : 4
- Jumlah operasi militer internal secara keseluruhan : 35
- Jumlah operasi militer yang berkarakteristik ofensif : 15

- Jumlah operasi militer yang berkarakteristik defensif : 24

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,341 <sup>a</sup>	1	,559		
Continuity Correction <sup>b</sup>	,002	1	,967		
Likelihood Ratio	,360	1	,548		
Fisher's Exact Test				1,000	,498
Linear-by-Linear Association	,333	1	,564		
N of Valid Cases	39				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,54.

b. Computed only for a 2x2 table

- Tabel ini adalah hasil penghitungan *chi-square*, di sini dapat dilihat bahwa *value* dari *pearson chi-square* adalah 0,341. Karena *Chi-square* hitung  $0,341 < Chi-square$  tabel 5,9915 maka  $H_0$  diterima.
- *Asymp. Sigma* memiliki nilai 0,559 karena nilainya  $>$  daripada alfa 0,05 maka  $H_0$  diterima dan secara otomatis  $H_1$  ditolak.
- Kesimpulan : tidak ada hubungan antara struktur ancaman dengan karakter operasi militer.<sup>85</sup>

Hasil pengujian statistik untuk mencari korelasi antara struktur ancaman dengan karakteristik operasi militer menunjukkan hasil cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil *chi-square test* pada kedua periode tersebut. Pada periode Demokrasi Terpimpin hasil pengujian SPSS menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara struktur ancaman dengan karakteristik operasi militer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur ancaman yang tinggi baik eksternal maupun internal memiliki keterkaitan dengan karakteristik operasi militer. Sementara pada periode Orde Baru hasil pengujian SPSS menunjukkan

<sup>85</sup> Hasil pengujian yang tidak signifikan pada periode Orde Baru dipengaruhi juga oleh perimbangan jenis ancaman dimana pada periode Orde Baru, *range* antara ancaman eksternal dan internal terpaut cukup jauh. Lain halnya dengan periode Demokrasi Tepimpin dimana variabel ancaman eksternal dan internal sama tinggi.

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara struktur ancaman baik eksternal maupun internal terhadap karakteristik operasi militer. Namun seperti yang telah dielaborasi penulis pada subbab 4.2.1 dan 4.2.2 menunjukkan bahwa struktur ancaman yang didominasi oleh ancaman internal yang tinggi terbukti mempengaruhi cara pandang doktrin dan hal ini diimplementasikan ke dalam penggelaran operasi-operasi militer yang berkarakter defensif. Pada akhirnya, hasil pengujian statistik ini merupakan suatu cara untuk memperkuat argumen penulis tentang keterkaitan antara struktur ancaman dengan karakteristik operasi militer.

#### **4.4. Kesimpulan**

Pada periode Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru terjadi perubahan struktur ancaman yang cukup signifikan dan mempengaruhi hubungan sipil militer serta variasi doktrin pertahanan Indonesia. Periode Demokrasi Terpimpin ditandai dengan tingginya intensitas ancaman baik internal maupun eksternal menempatkan periode ini pada kuadran Q3 (Jalan Tengah). Teori Struktural memprediksikan ancaman internal dan eksternal yang tinggi dapat menghasilkan pemimpin yang kurang berpengalaman dalam urusan-urusan militer. Hal ini dapat dilihat pada pertentangan antara Soekarno dan KSAD Nasution mengenai keputusan untuk melakukan gelar pasukan di Irian Barat. Struktur ancaman yang intensitasnya tinggi baik internal maupun eksternal juga berpengaruh pada penggelaran operasi-operasi militer yang didominasi karakteristik ofensif. Operasi-operasi militer ini mencerminkan karakter doktrin pertahanan Indonesia yang ofensif pada periode Demokrasi Terpimpin.

Pada periode Orde Baru, ditandai dengan tingginya ancaman internal dan rendahnya ancaman eksternal. Tingginya ancaman internal secara otomatis membuat doktrin pertahanan berorientasi ke dalam. Prediksi teori struktural Desch memperkirakan doktrin yang berorientasi ke dalam membuat orientasi militer ke dalam dan hal ini berpotensi menimbulkan keterlibatan militer ke dalam politik terutama keterlibatan dalam perumusan kebijakan-kebijakan mengenai pertahanan negara yang merupakan ranah profesional mereka. Di sisi lain, intensitas ancaman internal yang tinggi serta cara pandang doktrin yang ke dalam batas nasional saja

mempengaruhi penggelaran operasi-operasi militer yang berkarakteristik defensif yang lebih ditujukan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI baik darat maupun perairan. Operasi-operasi militer yang berkarakteristik defensif mencerminkan karakter doktrin pertahanan Indonesia yang defensif pada masa Orde Baru.

